



Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dengan Community Based Fishing System Management di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga

Ardi Putra, Eki Darmawan, Herry Wahyudi

Universitas Maritim Raja Ali Haji
ekidarmawan@umrah.ac.id

Abstract

The Coastal Community Economic Empowerment Program is a learning process that is quite diverse depending on the coastal potential of a region. In the empowerment of coastal communities, it is also important to have strong involvement from various parties, ranging from academics, government, the community itself and other stakeholders to provide opportunities and ensure the sustainability of the various results to be achieved. The implementation of this empowerment is also carried out with the concept of economic development that embraces community values to build a new paradigm in people-centered, participatory development. The purpose of this community service is to increase the knowledge, skills and actions of the community in improving the community's economy by utilizing the existing coastal potential in a sustainable manner as an alternative source of income. Using a participatory approach, counseling individually and in groups, using the method of conducting lectures and Focus Group Discussions (FGD) with the community and coastal Resun Village officials by exploring the existing coastal potential. This Coastal Community Empowerment also emphasizes on Community Based Fishing System Management, among others: 1. Maintaining environmental functions by utilizing the resources in it in a sustainable manner (sustainability). 2. Increase income (income generating) community members who obey the principles of equity and social justice. 3. Increasing local community political participation based on economic and political self-reliance.

Keywords: Community Empowerment, Coastal Economy, Participation, Sustainability

Abstrak

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan proses pembelajaran yang cukup beragam tergantung potensi pesisir suatu wilayah. Pada Pemberdayaan masyarakat pesisir juga penting adanya keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat itu sendiri dan stakeholders lainnya untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Pelaksanaan pemberdayaan ini juga dilakukan dengan konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tindakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi pesisir yang ada secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan alternatif. Menggunakan pendekatan partisipatif, penyuluhan secara perorangan



dan kelompok, dengan Metode dalam kegiatan melakukan metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat serta perangkat Desa Resun pesisir dengan melakukan penggalian potensi pesisir yang ada. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini juga menekankan pada Community Based Fishing System Management, antara lain: 1. Memelihara fungsi lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya di dalamnya secara lestari (sustainability). 2. Meningkatkan pendapatan (income generating) anggota komunitas yang taat pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial (equity and social justice). 3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal yang dilandasi pada adanya keswadayaan ekonomi dan politik (self reliance).

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Pesisir, Partisipasi, Keberlanjutan

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan pada masyarakat pesisir sangat memerlukan keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat itu sendiri dan stakeholders lainnya untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Sering yang menjadi permasalahan hampir disetiap wilayah pesisir Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan baik dalam hal kesejahteraan maupun tingkat pendapatan perkapita, apabila di bandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan sebagainya (Yusuf, 2013).

Media masa juga seringkali memberitakan tentang angin puting beliung memporak-porandakan pemukiman nelayan, abrasi pantai, banjir pasang, sampai rendahnya hasil tangkapan nelayan sehingga nelayan berhenti melaut (Haryanto, 2008). Dari semua itu sepertinya yang paling terkena dampak adalah masyarakat pesisir. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena faktor alamiah saja tetapi juga akibat ulah manusia khususnya masyarakat pesisir pantai sendiri. Mereka hanya berorientasi jangka pendek, hanya memanfaatkan hasilnya tanpa berusaha untuk menjaga dan merawatnya.

Sebenarnya, di dalam wilayah laut dan pesisir tersebut terkandung sejumlah potensi sumberdaya yang besar dan beragam. Salah satu sumberdaya tersebut dapat diperbarui (renewable resources), seperti ikan, udang, moluska, karang mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove dan hewan karang yang keberadaan dan kelestariannya tergantung dari pelestarian habitatnya (Haryanto, 2008). Selain hal tersebut juga berguna dalam jasa-jasa lingkungan (environmental service), seperti tempat-tempat (habitat) yang indah dan menyejukkan untuk potensi peristiwa serta rekreasi, kemudian juga sebagai wilayah media transportasi laut (Haryanto, 2008).

Menyadari potensi dan permasalahan di bidang pesisir, kelautan dan perikanan tersebut maka saat ini sudah mulai ada perubahan paradigma terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan, yang semula memanfaatkannya berfokus pada objek penelitian dan wahana pemersatu, kini berkembang menjadi paradigma pembangunan yang mengembangkan sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru serta mendukung kesejahteraan pada pelaku pembangunan secara adil, dengan tetap mempertahankan terpeliharanya daya dukung dan kelestarian sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan.



Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dalam proses pengambilan keputusan. Apabila masyarakat belum mampu atau tidak berdaya untuk menjalankan hak-haknya, termasuk ikut aktif dalam penyusunan atau perumusan kebijakan apapun seperti Peraturan Desa dan lainnya, maka pemerintah dan stakeholders lainnya harus memberikan sosialisasi atau pemberdayaan kepada masyarakat (Nurhadiyanti, 2022). Pemberdayaan dapat dilakukan dengan adanya modal sosial yang terdapat dalam masyarakat. Modal sosial adalah hubungan antar manusia, yaitu orang-orang yang melakukan tindakan terhadap satu sama lain karena kewajiban sosial dan timbal balik, solidaritas sosial, dan komunitas. Modal sosial inilah yang menjadi perekat yang menyatukan masyarakat. Oleh karena itu, suatu pemberdayaan akan berhasil jika memperkuat civil society atau masyarakat madani, yaitu struktur formal dan semi formal yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas inisiatif sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari masyarakat (Nurhadiyanti, 2022).

Pada artikel ini akan lebih spesifik membahas mengenai optimalisasi potensi pesisir yang ada di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga. Telah dilakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi pesisir yang ada secara berkelanjutan. Peningkatan potensi ekonomi ini merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan yang menjadi kerja global. implementasi konsep pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) di wilayah pesisir merupakan hal yang sangat perlu dikhawatirkan akan munculnya tantangan-tantangan global baru terkait dengan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan yang menjadi salah satu isu-isu yang tidak ada habisnya (Prayuda & Sary, 2019). Maka dari itu, pada pembahasan artikel ini akan lebih menekankan pada pemanfaatan potensi pesisir yang ada di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga dan sejauh mana pemanfaatan secara berkelanjutannya.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan melakukan metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat serta perangkat Desa Resun pesisir dengan melakukan penggalan potensi pesisir yang ada. Kegiatan dilakukan dengan model diskusi dua arah untuk mendapatkan klasifikasi karakteristik wilayah, potensi pesisir, dan kondisi sosial masyarakatnya. Kegiatan ini dilakukan di kantor Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga yang dilaksanakan pada Bulan Oktober Tahun 2022.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Resun Pesisir ini, terletak di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga memiliki luas Wilayah 33,10 Km² yang terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT) dengan populasi penduduk berjumlah 945 Jiwa dan memiliki akses transportasi darat dan laut (BPS Kabupaten Lingga, 2022). Kondisi ekonomi pada masyarakat Desa Resun Pesisir bergantung pada kondisi pesisir yang ada di wilayah

tersebut. Adapun beberapa potensi yang tergambar saat dilapangan adalah hamparan mangrove, budidaya udang vaname oleh kelompok pembudidayaan ikan (Pokdakan) Udang Galah Desa Resun Pesisir, kemudian beberapa industri rumah tangga berupa kerupuk udang dan ikan.

Tentunya dalam pemanfaatan hasil dari pesisir dan laut ini perlu pemahaman bersama agar kondisi alam yang dimanfaatkan dapat terjaga kelestariannya. Pada pelaksanaan pemberdayaan ini juga dilakukan dengan konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory* (Debora Vanda Yustin Lomboan, Joorie Ruru, 2021). Dalam pendekatan partisipatoris, pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memfasilitasi masyarakat agar mengalami proses belajar berdasarkan pengalaman (*experience based learning process*), sehingga dengan belajar dari pengalaman, kapabilitas mereka sebagai masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan dapat meningkat (Kurniasari & Reswati, 2011).

Pada program-program pemberdayaan sebelum 1989, partisipasi masyarakat terbatas pada implementasi dan penerapan program karena pada waktu itu kebijakan pemberdayaan lebih bersifat *top down*. Namun dalam era berikutnya konsep partisipasi dalam pemberdayaan mempunyai makna yang lebih luas, keterlibatan atas masyarakat tidak terbatas hanya pada tahap implementasi program namun mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi (Kurniasari & Reswati, 2011).

Untuk melakukan fungsi fasilitator ini, maka tim penulis melaksanakan program pemberdayaan dengan memberikan pemahaman yang bertugas untuk memandu proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok, menghubungkan antara kelompok dengan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program optimalisasi potensi pesisir, dan membantu menggerakkan aktivitas kelompok agar lebih produktif dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi pesisir.



Gambar.1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Resun Pesisir Tentang Optimalisasi Ekonomi Masyarakat dari Potensi Pesisir

Pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pesisir yang dilakukan di Desa Resun Pesisir Tentang Optimalisasi Ekonomi Masyarakat dari Potensi Pesisir ini merupakan program Pengabdian Masyarakat Terpadu yang dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022. Kegiatan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan tujuan dapat memberikan pemahaman berkaitan pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah geografis pesisir.

Dari hasil diskusi bersama masyarakat terdapat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Resun Pesisir tersebut diantaranya menjaga kelestarian mangrove dengan menanam bibit mangrove sebagai upaya pelestarian tersebut. Masyarakat menghadapi permasalahan terkait penanaman bibit mangrove tersebut. Menurut masyarakat tumbuhnya mangrove di pesisir mereka yang mereka tanami agak sedikit lama berkembang hal ini dikarenakan kondisi pasang surut yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, masalah penataan mangrove juga tidak berjalan lancar. Masyarakat masih dibingungkan dengan posisi mana yang lebih baik untuk ditanami mangrove, apakah di posisi depan mangrove yang telah ada (alami), berarti wilayah terluar, atau di posisi belakang mangrove yang tumbuh alami, berarti posisi terdalam atau yang dekat dengan daratan. Dalam kondisi tersebut mereka membutuhkan pendampingan yang intensif terkait hal itu dari profesional yang memahami pelestarian mangrove. Tim penulis tentunya menawarkan untuk memfasilitasi hal tersebut dengan menjembatani kepada pihak lain yang memahami masalah tersebut. Kondisi pelestarian mangrove tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut :



Gambar.2. Kondisi Pelestarian Bibit Mangrove yang dilakukan Masyarakat Desa Resun Pesisir

Kelestarian mangrove menjadi penting untuk ekosistem habitat laut seperti udang dan kepiting bakau. Tingginya dinamika sumberdaya pesisir ini tidak terlepas dari kompleksitas ekosistem tropis (*tropical ecosystem complexities*) yang telah menjadi salah satu ciri dari ekosistem tropis. Dalam konteks ini, pengelolaan pesisir dan perikanan yang tujuan ultimatnya adalah memberikan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekosistem yang menjadi media hidup bagi sumberdaya ikan itu sendiri (Penilaian et al., 2013).

Hutan mangrove atau sering disebut hutan bakau terdapat hampir diseluruh pantai di Desa Resun Pesisir. Berfungsi sebagai penyangga tanah pantai dari pengaruh ombak dan melindungi lumpurnya yang telah meluap dan tepi-tepi sungai terhadap arus pasang surut, serta sebagai pelindung perumahan masyarakat dari kencangnya angin laut. Secara langsung atau tidak langsung, hutan bakau dapat melindungi dan menyediakan makanan dari berbagai komunitas flora dan faunanya yang menunjang berkembangnya sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya(Haryanto, 2008). Ekosistem mangrove mempunyai sifat dan bentuk yang beranekaragam bagi manusia dan makluk hidup lainnya. Oleh karena itu ekosistem mangrove tersebut dimasukan sebagai salah satu ekosistem pendukung kehidupan yang penting, yang perlu diperhatikan kelestariannya.

Mengingat pemanfaatan pantai dan hutan mangrove yang terus meningkat, terutama untuk usaha pertambakan dan pemukiman, maka perlu dipertahankan pelestarian jalur hijau pantai khususnya mangrove, sebagai tempat pembentukan ekosistem hutan mangrove dan tempat perkembangbiakan biota laut. Upaya pemberdayaan ekonomi yang telah ditempuh adalah untuk lebih memberdayakan usaha masyarakat agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, yaitu dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Di dalam rangka pembinaan usaha masyarakat perlu dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecil serta koperasi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi (Tampubolon, 2013).



Gambar.3. Diskusi Dua Arah dengan Masyarakat Desa Resun Pesisir



Dari gambar diatas dilakukan diskusi dua arah bersama masyarakat Desa Resun Pesisir dalam membahas Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil diskusi bersama masyarakat ini, tim penulis menyarankan agar masyarakat dapat mengetahui potensi wilayahnya dengan memetakan kekuatan, kelebihan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Pada kesempatan ini juga, tim penulis juga membantu untuk memfasilitasi menghubungkan masyarakat dengan *stakeholders* lainnya, hal ini berhubungan dengan diskusi masyarakat di desa Resun Pesisir yang menginginkan pemahaman dan prosedur tentang bagaimana mendapatkan akses untuk mendapatkan dana untuk membangun desa yang berasal dari diluar dana desa, seperti contoh dana dari Kabupaten, Provinsi, serta LSM. Solusi yang diberikan oleh tim penulis ialah membangun perencanaan dan komunikasi dari tingkat bawah pranata Desa dengan melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan membuat perencanaan yang mapan serta membuka diri untuk bersinergi dengan *stakeholder* terkait seperti lembaga akademik Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, kemudian pemerintah khususnya Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan juga Dinas Lingkungan Hidup.

Pengembangan masyarakat yang dilakukan ini juga merupakan aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan dengan syarat menyentuh aspek-aspek keadilan, keseimbangan sumberdaya alam, partisipasi masyarakat, dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas (Tampubolon, 2013). Pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) yang telah dilakukan negara belum sepenuhnya mampu melindungi laut dan perikanan (pesisir) dari eksploitasi manusia, baik itu dari pengusaha maupun dari masyarakat sendiri. Bersamaan dengan itu, partisipasi masyarakat belum secara penuh terlibat dalam pengelolaan laut dan perikanan (pesisir). Dengan perkataan lain, pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) dengan perspektif produksi, efisiensi, sosial, ekonomi dan lingkungan harus menjadi komitmen dan tujuan dari pengelolaan laut dan perikanan (pesisir). Artinya pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan (pesisir) yang secara turun temurun dan berkelanjutan telah dipraktekkan dan dikembangkan oleh masyarakat laut dan pesisir harus digunakan untuk kesejahteraan mereka (Razali, 2004). Adapun penguatan yang dilakukan pada diskusi tentang pemberdayaan masyarakat pesisir Desa resun Pesisir ini adalah dengan memperhatikan konsep *Community Based Fishing System*.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan pola pengembangan *Community Based Fishing System Management*, antara lain: 1. Memelihara fungsi lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya di dalamnya secara lestari (*sustainability*). 2. Meningkatkan pendapatan (*income generating*) anggota komunitas yang taat pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial (*equity and social justice*). 3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal yang dilandasi pada adanya keswadayaan ekonomi dan politik (*self reliance*) (Razali, 2004).



D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut, yang lebih penting dari sejumlah prasyarat di atas adalah adanya pemahaman secara bersama mengenai pranata-pranata tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dipraktikkan masyarakat setempat. Pranata ini penting dicermati khususnya yang berkaitan dengan organisasi dan peraturan pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada serta bagaimana mengelolanya secara berkelanjutan untuk memanfaatkan secara ekonomis.

Saran

Perlu adanya perluasan peluang di bidang budidaya laut, wisata bahari dan usaha perikanan lainnya. Kedepannya lembaga keuangan mikro seperti kelompok nelayan dan industri rumah tangga di pedesaan pesisir dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Resun Pesisir. Perlu juga adanya kebijakan pemerintah daerah yang kuat dan konsisten terhadap pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti dukungan terhadap program ekonomi desa, penyediaan dana pendampingan program dan peningkatan infrastruktur penunjang usaha ekonomi masyarakat yang terus dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia terkait pemanfaatan secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terimakasih dari tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri (PKMM) Tahun 2022 yang dikelola secara terpadu oleh Panitia Fakultas di Kabupaten Lingga, Kemudian Pemerintah Kabupaten Lingga, PT.Pelabuhan Kepri, serta terkhusus bagi Pemerintah Desa Resun Pesisir dan jajarannya bersama masyarakat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Lingga. (2022). *KECAMATAN LINGGA UTARA DALAM ANGKA Lingga Utara Subdistrict in Figures 2022* ISSN:
- Debora Vanda Yustin Lomboan, Joorie Ruru, V. L. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), 28.
- Haryanto, R. (2008). Rehabilitasi Hutan Mangrove: Pelestarian Ekosistem Pesisir Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 14(2), 148–160.
<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/123>



- Kurniasari, N., & Reswati, E. (2011). Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.15578/marina.v6i1.5805>
- Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Tanah Pilih*, 2(1), 62–74. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.1187>
- Penilaian, M., Perikanan, P., Ekosistem, B., & Pengantar, K. (2013). *Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan Berpendekatan Ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management)*. 1–201.
- Prayuda, R., & Sary, D. V. (2019). Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46–64.
- Razali, I. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Komunitas*, 3(2), 61–68.
- Tampubolon, D. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Sorot*, 8(2), 153. <https://doi.org/10.31258/sorot.8.2.2358>
- Yusuf, M. J. (2013). *Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Nunukan*. 1(4), 1594–1607.